

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam analisis merupakan hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo kecuali Kecamatan Samigaluh dan Kokap. Jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 4 kuesioner, sehingga yang dapat digunakan untuk analisis sebanyak 96 kuesioner yang merupakan jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Tabel 4.1  
Analisis Pengembalian Kuesioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Prosentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebar	100	100
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	4	4
Total kuesioner yang dapat diolah	96	96

*Sumber: Data diolah, 2013*

- **Identitas Responden**

Identitas responden dalam penelitian ini dibagi berdasarkan 5 kategori, yaitu terdiri dari jenis kelamin Wajib Pajak, usia Wajib Pajak, pekerjaan Wajib Pajak, pendidikan Wajib Pajak, serta lamanya menjadi Wajib Pajak.

#### 1. Jenis Kelamin Wajib Pajak

Tabel 4.1.1. Hasil wawancara mengenai distribusi responden berdasarkan jenis

Tabel 4.2  
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Wajib Pajak

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki-laki	37	38,54
2	Perempuan	59	61,46
	<b>Jumlah</b>	96	100

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini responden yang memiliki jenis kelamin perempuan lebih dominan yaitu sebanyak 59 responden atau sebesar 61,46%. Responden laki-laki dalam penelitian ini yaitu sebanyak 37 responden atau sebesar 38,54%.

## 2. Usia Wajib Pajak

Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan usia Wajib Pajak:

Tabel 4.3  
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak

No	Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
1	< 25 Tahun	3	3,13
2	26-30 Tahun	8	8,33
3	31-35 Tahun	12	12,50
4	36-40 Tahun	26	27,08
5	> 40 Tahun	47	48,96
	<b>Jumlah</b>	96	100

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas responden yang paling banyak dalam

diteliti yaitu responden yang memiliki usia > 40 tahun yaitu sebanyak

47 responden atau sebesar 48,96%. Berikutnya adalah responden yang memiliki usia 36-40 tahun, yaitu sebanyak 26 responden atau sebesar 27,08%. Pada urutan ketiga merupakan responden yang memiliki usia 31-35 tahun, yaitu sebanyak 12 responden atau sebesar 12,50%. Pada urutan keempat merupakan responden yang memiliki usia 26-30 tahun, yaitu sebanyak 8 responden atau sebesar 8,33%. Responden yang paling sedikit dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki usia < 25 tahun, yaitu sebanyak 3 responden atau sebesar 3,13%.

### 3. Pekerjaan Wajib Pajak

Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan pekerjaan Wajib Pajak:

Tabel 4.4  
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak

No	Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Dokter	32	33,33
2	Bidan	57	59,38
3	Perawat	7	7,29
4	Lain-lain	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	96	100

*Sumber: Data diolah, 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling banyak dalam penelitian ini yaitu responden yang bekerja sebagai bidan, yaitu sebanyak 57 responden atau sebesar 59,38%. Pada urutan kedua merupakan responden yang bekerja sebagai dokter yaitu sebanyak 32

responden atau sebesar 33,33%. Sisanya yaitu responden yang bekerja sebagai perawat, yaitu sebanyak 7 responden atau sebesar 7,29%.

#### 4. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan Wajib Pajak:

Tabel 4.5  
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Diploma	42	43,75
2	S1	26	27,08
3	S2	15	15,63
4	Lain-lain	13	13,54
	<b>Jumlah</b>	96	100

*Sumber: Data diolah, 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan dalam penelitian ini merupakan responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma (D1, D2, D3). Pada urutan kedua merupakan responden yang memiliki tingkat pendidikan jenjang S1, yaitu sebanyak 26 responden atau sebesar 27,08%. Berikutnya adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan jenjang S2, yaitu sebanyak 15 responden atau sebesar 15,63%. Jumlah responden yang paling sedikit yaitu responden yang mengisi tingkat pendidikannya pada lain-lain, yaitu sebanyak 13 responden atau sebesar 13,54%. Pada tingkat pendidikan lain-lain ini beberapa responden mengisi dengan jawaban mengambil pendidikan spesialis, dan ada juga yang SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)

## 5. Lamanya menjadi Wajib Pajak

Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan lamanya menjadi Wajib Pajak:

Tabel 4.6  
Distribusi Responden Berdasarkan Lamanya menjadi Wajib Pajak

No	Lamanya menjadi WP	Frekuensi	Prosentase (%)
1	1-5 Tahun	6	6,25
2	6-10 Tahun	23	23,96
3	11-15 Tahun	29	30,21
4	> 15 Tahun	38	39,58
	<b>Jumlah</b>	96	100

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan dalam penelitian ini adalah responden yang telah menjadi Wajib Pajak selama > 15 tahun, yaitu sebanyak 38 responden atau sebesar 39,58%. Berikutnya merupakan responden yang telah menjadi Wajib Pajak selama 11-15 tahun, yaitu sebanyak 29 responden atau sebesar 30,21%. Pada urutan ketiga merupakan responden yang telah menjadi Wajib Pajak selama 6-10 tahun, yaitu sebanyak 23 responden atau sebesar 23,96%. Responden yang paling sedikit dalam penelitian ini adalah responden yang menjadi Wajib Pajak selama < 5 tahun, yaitu sebanyak 6 responden atau sebesar 6,25%.

### B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menyajikan nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi jawaban responden atas pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistic**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Kesadaran Pengetahuan dan pemahaman	96	10,00	25,00	19,72	3,221
Persepsi Tingkat kepercayaan	96	11,00	25,00	19,12	2,799
Sanksi Kualitas layanan	96	9,00	25,00	18,20	3,349
Kemauan	96	9,00	25,00	18,34	3,384
Valid N (listwise)	96	10,00	25,00	19,65	3,238
	96	10,00	25,00	20,09	2,858
	96	13,00	25,00	19,66	2,440

*Sumber: Data diolah, 2013*

Tabel di atas menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 96 responden. Nilai minimum variabel kesadaran membayar pajak sebesar 10,00 dan nilai maksimumnya sebesar 25,00. Rata-rata nilai untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 19,72 dengan standar deviasi sebesar 3,221. Nilai minimum untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sebesar 11,00 dan nilai maksimumnya sebesar 25,00. Rata-rata nilai untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sebesar 19,12 dengan standar deviasi sebesar 2,799.

Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 9,00 dan persepsi yang baik atas efektivitas

sistem perpajakan memiliki nilai maksimum sebesar 25,00. Rata-rata nilai untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah sebesar 18,20 dengan standar deviasi sebesar 3,349. Nilai minimum variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum adalah sebesar 9,00 dan nilai maksimumnya sebesar 25,00. Rata-rata nilai untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum adalah sebesar 18,34 dengan standar deviasi sebesar 3,384.

Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 10,00 dan nilai maksimumnya sebesar 25,00. Rata-rata nilai untuk variabel sanksi pajak sebesar 19,65 dengan standar deviasi sebesar 3,238. Nilai minimum untuk variabel kualitas layanan fiskus sebesar 10,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Rata-rata nilai untuk variabel kualitas layanan fiskus sebesar 20,09 dengan standar deviasi sebesar 2,858. Variabel kemauan membayar pajak memiliki nilai minimum sebesar 13,00 dan nilai maksimumnya sebesar 25,00. Rata-rata nilai untuk variabel kemauan membayar pajak sebesar 19,66 dengan standar deviasi sebesar 2,440.

### **C. Uji Kualitas Data**

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas ini digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner. Menurut Ghazali (2009), suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil analisis dapat diperoleh dengan

membandingkan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan tabel t dan r *product moment* dengan signifikansi 5%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.8  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	R Hitung	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	KS 1	0,683	Valid
	KS 2	0,685	Valid
	KS 3	0,651	Valid
	KS 4	0,642	Valid
	KS 5	0,581	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	PP 1	0,347	Valid
	PP 2	0,466	Valid
	PP 3	0,427	Valid
	PP 4	0,658	Valid
	PP 5	0,342	Valid
Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan	PE 1	0,620	Valid
	PE 2	0,678	Valid
	PE 3	0,452	Valid
	PE 4	0,655	Valid
	PE 5	0,641	Valid
Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum	TK 1	0,659	Valid
	TK 2	0,693	Valid
	TK 3	0,455	Valid
	TK 4	0,647	Valid
	TK 5	0,650	Valid
Sanksi Pajak	SP 1	0,708	Valid
	SP 2	0,609	Valid
	SP 3	0,611	Valid
	SP 4	0,677	Valid
	SP 5	0,551	Valid
Kualitas Layanan Fiskus	KL 1	0,587	Valid
	KL 2	0,636	Valid
	KL 3	0,435	Valid
	KL 4	0,471	Valid
	KL 5	0,689	Valid
Kemauan Membayar Pajak	KM 1	0,572	Valid
	KM 2	0,562	Valid
	KM 3	0,394	Valid
	KM 4	0,487	Valid
	KM 5	0,539	Valid

Pada penelitian ini  $r_{\text{tabel}}$  menunjukkan angka 0,2006. Suatu data dapat dikatakan valid jika  $r_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $r_{\text{tabel}}$ . Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan yang ditampilkan dalam kuesioner memiliki  $r_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $r_{\text{tabel}}$  (0,2006), sehingga dapat dinyatakan valid. Hal tersebut berarti bahwa butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat digunakan dan mampu mewakili setiap variabel yang diteliti.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,

Tabel 4.9  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	0,842	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	0,688	Reliabel
Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan	0,815	Reliabel
Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,823	Reliabel
Sanksi Pajak	0,831	Reliabel
Kualitas Layanan Fiskus	0,785	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0,741	Reliabel

*Sumber: Data diolah, 2013*

Berdasarkan hasil analisis data seperti dapat dilihat pada tabel di atas diperoleh data yang reliabel. Variabel kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,842, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,688, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,815, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,823, sanksi pajak menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,831, kualitas layanan fiskus menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,785, dan kemauan membayar pajak menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,741. Melihat nilai *cronbach alpha* pada semua variabel dapat disimpulkan bahwa semua variabel handal atau

## D. Uji Asumsi Klasik

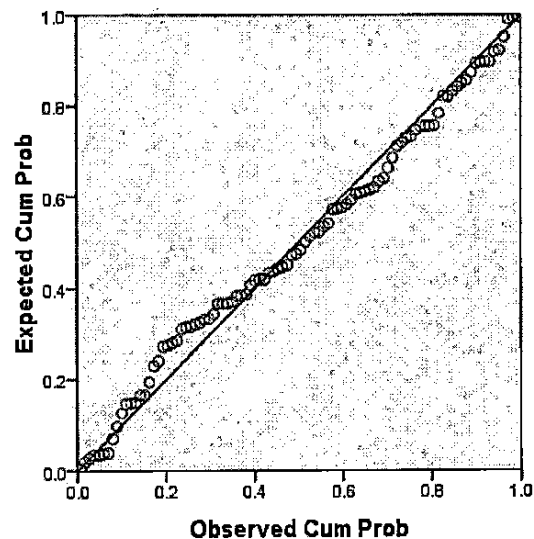
### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2009) salah satu cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh grafik seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1  
Hasil Uji Normalitas

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kemauan membayar pajak



Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti sumbu diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan membandingkan besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan nilai *tolerance*. Suatu model regresi dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 10%. Hasil pengujian multikolineritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	Nilai Tolerance	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	1,041	0,960	Bebas
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	1,100	0,909	Bebas
Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan	1,043	0,959	Bebas
Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum	1,090	0,918	Bebas
Sanksi Pajak	1,040	0,962	Bebas
Kualitas Layanan Fiskus	1,051	0,951	Bebas

Sumber: Data diolah, 2013

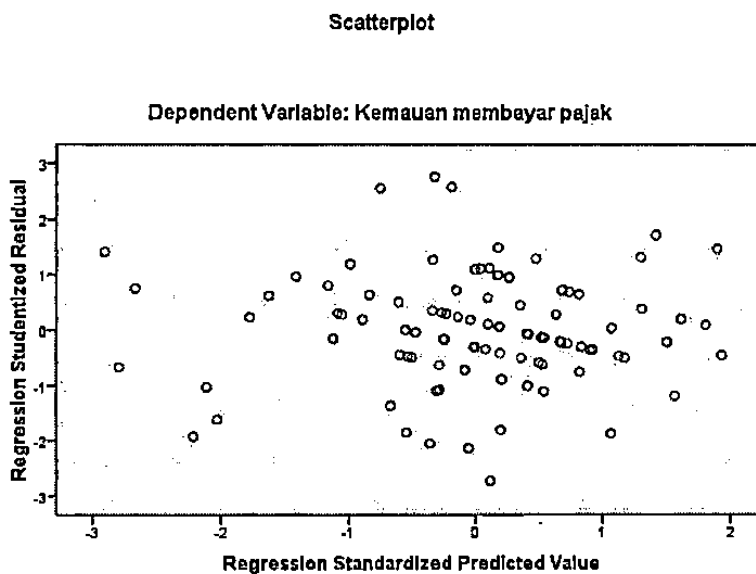
Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh nilai VIF untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 1,041, variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sebesar 1,100, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 1,043, variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar

1,090, variabel sanksi pajak sebesar 1,040, dan variabel kualitas layanan fiskus sebesar 1,051. Nilai *tolerance* untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,960, variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sebesar 0,909, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,959, variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar 0,918, variabel sanksi pajak sebesar 0,962, dan variabel kualitas layanan fiskus sebesar 0,951. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai VIF pada semua variabel kurang dari angka 10 dan nilai *tolerance* pada semua variabel lebih besar dari 10% atau 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada semua variabel penelitian ini atau tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

### **3. Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009), yaitu jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di

Gambar 4.2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



*Sumber: Data diolah, 2013*

Dari hasil analisis data yang dilakukan terlihat bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot*, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

### 1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sanksi pajak, dan kualitas layanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

berdasarkan analisis data, diperoleh hasil analisis yang dapat dilihat pada

Tabel 4.11  
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.210	3.791		2.166	.033
Kesadaran membayar pajak	-.018	.072	-.023	-.246	.806
Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak	.080	.085	.092	.944	.347
Persepsi yang baik	.287	.069	.394	4.166	.000
Tingkat kepercayaan	.117	.070	.161	1.665	.099
Sanksi pajak	-.049	.071	-.064	-.682	.497
Kualitas layanan fiskus	.192	.081	.225	2.375	.020

a. Dependent Variable: Kemauan membayar pajak

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,210 - 0,018X_1 + 0,080X_2 + 0,287X_3 + 0,117X_4 - 0,049X_5 + 0,192X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Kemauan membayar pajak

X<sub>1</sub> = Kesadaran membayar pajak

X<sub>2</sub> = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak

X<sub>3</sub> = Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

X<sub>4</sub> = Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan budaya



$X_5$  = Sanksi pajak

$X_6$  = Kualitas layanan fiskus

$e$  = error

## 2. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai  $t$  sebesar  $-0,246$  dan koefisien negatif sebesar  $-0,018$ .  $P$  value pada variabel kesadaran membayar pajak sebesar  $0,806$ , sehingga  $P$  value ( $0,806$ )  $>$   $\alpha$  ( $0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak tidak diterima.

## 3. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai  $t$  sebesar  $0,944$  dan koefisien positif sebesar  $0,080$ .  $P$  value pada variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sebesar  $0,347$ , sehingga  $P$  value ( $0,347$ )  $>$   $\alpha$  ( $0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak tidak diterima.

## 4. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai  $t$  sebesar  $4,166$  dan koefisien positif sebesar  $0,287$ .  $P$  value pada variabel persepsi yang baik

atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,000, sehingga *P value* (0,000)  $< \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak diterima.

#### **5. Pengujian Hipotesis 4**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *t* sebesar 1,665 dan koefisien positif sebesar 0,117. *P value* pada variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar 0,099, sehingga *P value* (0,099)  $> \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak tidak diterima.

#### **6. Pengujian Hipotesis 5**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *t* sebesar -0,682 dan koefisien negatif sebesar -0,049. *P value* pada variabel sanksi pajak sebesar 0,497, sehingga *P value* (0,497)  $> \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak tidak diterima.

#### **7. Pengujian Hipotesis 6**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *t* sebesar 2,375 dan koefisien positif sebesar 0,192. *P value* pada variabel kualitas layanan

disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak diterima.

## 8. Uji Nilai F

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sanksi pajak, dan kualitas layanan fiskus dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh data yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12  
Hasil Uji Nilai F

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	134.654	6	22.442	4.634	.000 <sup>a</sup>
Residual	431.002	89	4.843		
Total	565.656	95			

a. Predictors: (Constant), Kualitas layanan fiskus, Persepsi yang baik, Kesadaran membayar pajak, Tingkat kepercayaan, Sanksi pajak, Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak

b. Dependent Variable: Kemauan membayar pajak

*Sumber: Data diolah, 2013*

4,634, dengan *P value* (0,000) <  $\alpha$  (0,05). Artinya variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sanksi pajak, dan kualitas layanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

### 9. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya prosentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.488 <sup>a</sup>	.238	.187	2.201

- a. Predictors: (Constant), Kualitas layanan fiskus, Persepsi yang baik, Kesadaran membayar pajak, Tingkat kepercayaan, Sanksi pajak, Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak
- b. Dependent Variable: Kemauan membayar pajak

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *adjusted R square* adalah sebesar 0,187 atau sebesar 18,7%. Hal ini membuktikan bahwa variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sanksi pajak, dan kualitas layanan fiskus sebesar 18,7%, sedangkan sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian atau di luar penelitian.

## **F. Pembahasan**

Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturakhman, dan Pratiwi (2012) serta Widayati dan Nurlis (2010) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia dinilai masih sangat rendah. Hal tersebut salah satunya dapat dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat atau dengan kata lain masyarakat tidak merasakan jasa timbal secara langsung atas pembayaran

pajak yang mereka lakukan, sehingga menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak rendah.

Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan juga masih minimnya training-training tentang peraturan pajak menjadi salah satu penyebab masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat menjadi dorongan bagi para aparatur pajak di Indonesia untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan pajak agar kemauan masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursalim (2011) yang menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya sistem

pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Filling*, pendaftaran NPWP melalui *e-registration* dari *website* pajak dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis empat menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012). Adanya kasus-kasus mafia dalam dunia perpajakan menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum di negara ini. Masyarakat juga mengira bahwa masih banyak kasus-kasus mafia dalam dunia pajak yang belum terungkap (Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi, 2012).

Hasil pengujian hipotesis lima menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Jika pemberian sanksi pada Wajib Pajak semakin ditingkatkan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila pemberian sanksi kepada Wajib Pajak menurun, maka kepatuhan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya juga akan menurun

mungkin sanksi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah kurang tegas sehingga belum bisa meningkatkan kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Hasil pengujian hipotesis enam menunjukkan bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) serta Nugroho (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki suatu keyakinan bahwa para petugas pajak telah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cukup baik, sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.